

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Penduduk Miskin

Supriatna, T. (2000) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskina bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan (Avrianti 2019:56).

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat ketika terdapat penurunan pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Pada dasarnya ketika suatu masyarakat tidak hanya mencukupi kebutuhan pangan, tetapi juga pendidikan serta kesehatan

masyarakat. Masyarakat dikatakan miskin apabila memiliki pendapatan rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki peluang untuk dapat hidup sejahtera. (Anwar & Fatmawati, 2018:43).

Menurut Ferezagia, D.V (2018:64) dalam penelitiannya menyatakan bahwa prioritas pembangunan salah satunya adalah masalah kemiskinan, karena merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Persoalan kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan.

Kemiskinan dianggap sebagai kurangnya pendapatan (uang) yang didapat dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat atau penduduk miskin atau dapat dikatakan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak, kemiskinan pada tiap daerah memiliki ciri yang berbeda, kemudian perbedaan tersebut mencakup kemiskinan sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan tersebut.

Menurut Fikri et al., (2016) dalam salah satu jurnalnya menyatakan bahwa masalah kemiskinan ini mayoritas terjadi di daerah perkotaan hal ini dikarenakan urbanisasi perkotaan itu sendiri. Kebutuhan-kebutuhan yang semakin meningkat seperti sandang, papan, pangan, maupun kebutuhan akan lapangan pekerjaan merupakan akibat dari terjadinya proses urbanisasi.

Pemahaman akan kemiskinan dilihat dari berbagai cara, yaitu: *Pertama*, gambaran kekurangan materi yang mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dimaksud sebagai kondisi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. *Kedua*, gambaran mengenai kebutuhan sosial yang dimaksud disini yaitu terkucilkan sosial, ketergantungan, serta ketidakmampuan dalam hal berpartisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan dalam arti ini dimaksudkan sebagai masalah-masalah politik dan moral serta tidak dibatasi pada bidang ekonomi. *Ketiga*, gambaran mengenai kurangnya pendapatan dan kekayaan yang memadai (Solikatun et al., 2014).

Terdapat 4 pola kemiskinan yang dikemukakan oleh Sumitro Djojohadikusumo (1995) yaitu: *Persistent Poverty* kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun, *Cyclical Poverty* kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan, *Seasonal Poverty* kemiskinan musiman seperti nelayan dan petani tanaman pangan, *Accidental Poverty* kemiskinan karena terjadinya bencana alam maupun dampak dari suatu kebijakan tertentu yang mengakibatkan penurunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penyebab terjadi kemiskinan sangatlah kompleks sehingga perspektif dalam melihat berdasarkan persoalan dalam masyarakat. Biasanya terjadi karena adanya sebagian kelompok yang masuk dalam golongan yang tidak beruntung dapat disebut kemiskinan fisik yang lemah dan ketidakberdayaan.

Penyebab terjadinya kemiskinan antara lain: Pertama, tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai karena ketidakseimbangan dengan jumlah penduduk yang ada atau dapat dikatakan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah penduduknya; Kedua, laju pertumbuhan penduduk terus berkembang sehingga meningkatnya jumlah penduduk akan berakibat terpuruknya keadaan ekonomi, karena jumlah penduduk yang bekerja tidak seimbang dengan jumlah beban ketergantungan. Pendapatan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk dibawah kemiskinan; Ketiga, angkata kerja, penduduk yang bekerja dan pengangguran. Secara garis besarpenduduk suatu negara dibagi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja; Empat, Tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan rendahnya kualitas penduduk dalam hal ini pengetahuan tenaga kerja. Jika ingin adanya perkembangan atau pertumbuhan ekonomi dibutuhkannya lebih banyak tenaga kerja yang memiliki skiil atau paling tidak dapat membaca ataupun menulis. Pendidikan yang tinggi juga akan mempengaruhi pada pendapatan yang tinggi sehingga dengn pendapatan tersebut seseorang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga kemakmuran penduduk dapat teratasi. Kemiskinan itu sendiri melekat pada masyarakat miskin, hal ini disebabkan karena tidak tersedianya alat produksi yang memadai untuk peningkatan terhadap kapasitas produksi.

Kartasasmita, G (1996) berpendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh adanya faktor sebagai berikut: 1) Terbatasnya sumber daya alam 2)

Teknologi dan tenaga ahli rendah 3) Rendahnya sumber daya manusia 4) Sarana dan prasarana termasuk kelembagaan yang belum baik Rendahnya faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan kegiatan perekonomian menjadi rendah. Rendahnya kegiatan ekonomi nantinya akan berakibat juga pada rendahnya produktivitas dan juga upah yang diterima masyarakat yang pada akhirnya akibat dari rendahnya upah yang diterima yaitu masyarakat tidak mampu membeli kebutuhan hidup sehari-hari dan kemudian menyebabkan terjadinya kemiskinan.

Salah satu teori kemiskinan yaitu teori Lingkar Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953) bahwa negara itu miskin karena pada dasarnya memang miskin. Teori ini merupakan konsep yang mengandaikan suatu hubungan melingkar dari sumber-sumber daya yang cenderung saling mempengaruhi satu sama lainnya secara sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara miskin terus menerus dalam keadaan miskin. Dapat dikatakan lingkaran setan tersebut diumpamakan bahwa kemiskinan itu ibarat sebuah lingkaran yang tidak memiliki pangkal dan terus menerus memutar pada lingkaran yang sama. Menurut pendapatnya pada intinya lingkaran setan kemiskinan itu bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi juga disebabkan pada hambatan pembangunan dimasa yang akan datang. Nurkse juga berpendapat bahwa suatu negara menjadi miskin karena negara tersebut negara miskin, hal ini dikarenakan negara tersebut rendah dalam hal produktivitas. Ketika produktivitas rendah maka dapat berakibat pada

penghasilan pendapatan yang diterima masyarakat menjadi rendah, hal ini akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan konsumsi yang minim. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab masyarakat tidak dapat menabung, padahal tabungan tersebut sumber utama dalam pembentukan modal masyarakat. Tabungan yang rendah akan berakibat pada penurunan investasi sehingga keadaan tersebut menuju keadaan kurangnya modal, maka kondisi tersebutlah akan terus menerus berputar seperti lingkaran.

Maka dapat ditarik kesimpulan mengenai kemiskinan yaitu ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar hidup. Dimana kemiskinan ini merupakan kondisi kekurangan, sehingga dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak dapat dibeli. Pada kenyataannya seseorang tidak ingin menjadi miskin, melainkan kondisi yang tidak dapat dihindari dengan suatu kekuatan yang apa adanya.

2.1.1.1 Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Namun demikian, ada 2 macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relative yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang memandang dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang bermuara atau berwujud sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan. Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai tingkat absolut dari pendapatan

atau standar hidup. Kemiskinan absolut selain dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup layak, juga ditentukan oleh tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin atau sering disebut dengan istilah garis kemiskinan. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan dan pendidikan.

2. Kemiskinan Relative

Kemiskinan relatif, memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran lain yang berhubungan dengan proporsi atau distribusi. Sekelompok orang dalam masyarakat dikatakan mengalami kemiskinan relatif apabila pendapatannya lebih rendah dibandingkan kelompok lain tanpa memperhatikan apakah mereka masuk dalam kategori miskin absolut atau tidak. Kemiskinan struktural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.

2.1.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Faktor Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2019:73) sebagai berikut:

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah;
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah;
3. Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal.

Kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh diantaranya karena keterbatasan aset yang dimiliki yaitu:

1. Natural assets: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa sumber hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.
2. Human assets: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).
3. Physical assets: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.

4. Financial assets: berupa tabungan (saving), serta akses untuk memperoleh modal usaha.
5. Social assets: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan-keputusan politik

2.1.1.3 Indikator Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 7.057 per orang perhari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Sedangkan ukuran menurut World Bank menetapkan standar kemiskinan berdasarkan pendapatan per kapita. Penduduk yang pendapatan per kapitanya kurang dari sepertiga rata-rata pendapatan perkapita nasional. Dalam konteks tersebut, maka ukuran kemiskinan menurut World Bank adalah USD \$2 per orang per hari. Ukuran kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan pada norma pilihan dimana norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran didasarkan konsumsi (consumption based poverty line).

2.1.2 Pekerja Sektor Informal

2.1.2.1 Pengertian Pekerja Sektor Informal

Salah satu landasan hukum tentang ketenagakerjaan yaitu Undang-undang No.25 Tahun 1997, dalam Undang-undang tersebut mengatakan pekerja sektor informal ialah mereka yang memperoleh upah atas apa yang sudah diselesaikan atau dikerjakannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “usaha sektor informal” sendiri adalah kegiatan perorangan, keluarga, atau kelompok orang yang menjalankan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan tetapi tidak berbadan hukum. Semua berdasarkan asas saling percaya dan kesepakatan untuk menerima upah, imbalan atau pembagian keuntungan menjadi dasar hubungan kerja bisnis sektor informal dengan karyawannya.

Menurut penelitian Saparini, H dan Basri (2005), tenaga kerja informal adalah jenis tenaga kerja yang didasarkan pada kriteria yang sama dengan tenaga kerja formal tetapi tidak diakui sebagai pegawai yang aktif pajak. Karena tidak terorganisir dengan baik dan tanpa perlindungan hukum secara formal, mudah untuk mendapatkan kecurangan dalam kerja oleh para pemberi kerja.

Menurut Hendri Saparini dan M. Chatib Basri (2012:36) dalam BPS Jawa Barat menyebutkan bahwa tenaga Kerja sektor informal adalah tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak. Pekerja sektor informal contohnya adalah pedagang kaki lima (PKL),

becak, peñata parkir, pengamen, dan anak jalanan, pedagangpasar, buruh tani dan lainnya.

Menurut beberapa definisi diatas, contoh pekerja informal diantaranya ialah pedagang toko kelontong, ojek pangkalan, penjual kerajinan rumahan, dalam hal ini pekerja sektor informal ialah semua pekerja yang tidak terikat oleh kontrak formal, tidak memiliki fasilitas perlindungan jaminan sosial dan kesehatan.

2.1.2.2 Karakteristik Pekerja Sektor Informal

Konsep informal yang digunakan dalam publikasi ini mengacu pada kesepakatan dalam ICLS ke-17 (17th *International Conference on Labor Statisticians*) tahun 2003. Sektor informal adalah sekelompok unit produksi yang merupakan bagian dari sektor rumah tangga, atau apa yang disebut sebagai usaha rumah tangga tidak berbadan hukum (*Household Unincorporated Enterprise*).

ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja informal sebagai “karyawan dianggap memiliki pekerjaan informal jika hubungan kerja mereka tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, tidak dikenakan pajak pendapatan, minimnya perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja (seperti pemberitahuan pemecatan sebelumnya, sistem pembayaran gaji tanpa rincian/nota, atau tiadanya hak cuti, ijin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk konsep pekerjaan dan bukan untuk tenaga kerja karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

International Labour Organization (ILO) mendefinisikan pekerja informal adalah mereka yang bekerja sebagai pekerja mandiri (berusaha sendiri) dan pekerja yang membantu keluarga (pekerja keluarga). BPS menambahkan pekerja bebas dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar termasuk ke dalam pekerja informal. Hal ini disebabkan sifat pekerja bebas di Indonesia (termasuk Jawa Barat) yang biasanya bersifat informal dengan upah yang tidak memadai, produktivitas rendah dan kondisi kerja yang relatif buruk (BPS Jawa Barat, 2025:13).

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: (1) berusaha sendiri informal dan (2) pekerja upahan informal yang dipekerjakan di usaha formal atau informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, tanpa jaminan ketenagakerjaan atau perlindungan sosial. Adapun yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi/kemitraan produksi informal.

2.1.3 Rata-Rata Lama Sekolah

2.1.3.1 Pengertian Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah adalah indikator yang menunjukkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia tertentu (biasanya usia 15 tahun ke atas) untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata Lama juga ukuran seberapa jauh masyarakat telah mengakses dan menyelesaikan pendidikan formal, yang secara langsung

berkaitan dengan kualitas hidup, kemampuan bersaing di dunia kerja, dan kesejahteraan ekonomi.

2.1.3.2 Pengertian Pendidikan

Pendidikan dianggap memiliki peran penting dalam menentukan kualitas manusia. Implikasinya, semakin tinggi pendidikan seseorang maka kehidupan seseorang akan semakin berkualitas. Pendidikan adalah penentu utama pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pendapatan. Jika pendidikan diabaikan maka akan membahayakan kesejahteraan generasi mendatang, dengan dampak yang meluas bagi kemiskinan, pengucilan sosial, dan berkelanjutan sosial. Teori human capital atau modal manusia yang dikemukakan oleh Becker (1993), memaparkan bahwa pendidikan dapat mengajarkan kepada para pekerja tentang keahlian-keahlian yang dapat meningkatkan produktivitas dan pekerja akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi pula. Dengan adanya peningkatan di dalam pendidikan tenaga kerja, maka diharapkan hal tersebut akan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja tersebut. Analisis atas investasi dalam bidang pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Becker (1993) menyatakan bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses dalam kegiatan investasi yang nantinya akan menambah keahlian (investment in human capital). Investasi dalam pendidikan menengah memberikan dorongan yang jelas bagi pembangunan ekonomi, jauh lebih baik daripada yang dapat dicapai dengan pendidikan dasar saja.

Pendidikan dasar harus dilengkapi dengan tujuan untuk memastikan bahwa sebagian besar penduduk setidaknya telah menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya (IIASA, 2008). Investasi sumber daya manusia harus lebih diprioritaskan sejajar dengan investasi modal fisik karena dengan hal tersebutlah pendidikan akan menjadi investasi jangka panjang sehingga mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Lester Thurow (1974), John Meyer (1977) dan Randall Collins (1979) terdapat 3 teori mengenai pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu; 1) Teori modal manusia. Teori modal manusia menjelaskan proses dimana pendidikan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Argumensi yang disampaikan oleh pendukung teori ini adalah manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, maka akan semakin tinggi produktivitas, sehingga hasilnya ekonomi nasional akan bertumbuh lebih tinggi. 2) Teori alokasi, dalam teori alokasi ini menyampaikan bahwa tingkat pendidikan tidak selalu sesuai dengan kualitas pekerjaannya, sehingga masyarakat yang berpendidikan tinggi maupun rendah tidak berbeda produktivitasnya dalam menangani pekerjaan yang sama. Teori ini juga menekankan bahwa dalam ekonomi modern saat ini, angkatan kerja yang berkeahlian tinggi tidak

begitu dibutuhkan lagi karena perkembangan teknologi yang cepat dan proses produksi yang semakin dapat disederhanakan. Sehingga masyarakat yang berpendidikan rendah tetapi mendapat pelatihan yang akan memiliki produktivitas relatif sama dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi dan formal. 3) Teori pertumbuhan kelas atau setrata sosial, berargumen bahwa fungsi utama pendidikan adalah menumbuhkan struktur kelas dan ketidakseimbangan sosial.

2.1.3.3 Indeks Pendidikan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Indikator yang digunakan dalam mengukur indeks pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling* - MYS) dan angka melek huruf. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis, sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan untuk penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, angka melek huruf juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf adalah 100 (seratus), sedangkan batas minimumnya 0 (nol). Nilai 100 menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, sedangkan nilai 0 mencerminkan kondisi sebaliknya.

2.1.4 Jumlah Pengangguran

2.1.4.1 Pnegertian Pengangguran

Menurut Sukirno (2018:94), pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja (15-64 tahun) ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran adalah keadaan dimana orang ingin bekerja namun tidak mendapat pekerjaan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menggunakan beberapa indikator untuk mengukur tingkat pengangguran di negara tersebut. Salah satu indikator utama yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka

(TPT). Berikut adalah penjelasan mengenai indikator pengangguran menurut BPS:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT adalah persentase jumlah orang yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan terhadap angkatan kerja. Orang dianggap sebagai bagian dari angkatan kerja jika mereka berusia 15-64 tahun dan mampu serta bersedia bekerja. Jadi, TPT mengukur proporsi orang yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan aktif dalam angkatan kerja.

2. Angkatan Kerja (AK)

Angkatan kerja adalah total jumlah orang yang bekerja dan mencari pekerjaan di suatu negara. Ini mencakup orang yang bekerja dan juga orang yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan (pengangguran terbuka).

3. Angkatan Usia Kerja (AU)

Angkatan usia kerja adalah jumlah orang yang berada dalam rentang usia yang umumnya dianggap sebagai usia produktif untuk bekerja, yaitu 15-64 tahun. AU adalah dasar untuk menghitung TPT dan tingkat partisipasi angkatan kerja.

4. Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)

Penduduk usia produktif adalah jumlah orang yang berusia antara 15-64 tahun di suatu negara. Penduduk ini dianggap sebagai anggota potensial dari angkatan kerja.

Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Dalam ilmu kependudukan (demografi), pengangguran adalah orang yang mencari kerja dan mereka masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Berdasarkan 2 kategori usia, angkatan kerja adalah mereka yang berusia 15-64 tahun dan sedang mencari kerja, sedangkan mereka yang tidak mencari kerja maka tidak masuk angkatan kerja. Jadi tingkat pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang tidak/belum mendapatkan pekerjaan (Basrowi, 2018:97).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengangguran adalah:

1. Suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja (15-64 tahun) ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.
2. Seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkan.

3. Suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan.
4. Orang yang mencari kerja dan mereka masuk dalam kelompok penduduk yang disebut angkatan kerja. Mereka yang berusia 15-64 tahun dan sedang mencari kerja.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Pengangguran

Pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Berdasarkan pengertian di atas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: Pertama, Pengangguran terselubung (*Disguised Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu (sakit, hamil, invalid/difabel); Kedua, Setengah menganggur (*Under Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu; Ketiga, Pengangguran terbuka (*Open Unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal (Basrowi, 2018:105).

Pengangguran terdiri dari 3 macam:

1. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara maksimal karena suatu alasan tertentu.

2. Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang kurang dari 35 jam perminggu.
3. Pengangguran terbuka adalah tenagakerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan.

Pengangguran terbuka adalah pengangguran baik sukarela (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan lebih baik) maupun secara terpaksa (mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan). Pengangguran ini terjadi ada yang karena belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan ada juga yang karena malas mencari pekerjaan atau malas bekerja. Dapat disimpulkan pengertian dari pengangguran terbuka adalah seseorang yang termasuk dalam kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, dan bersedia menerima pekerjaan, serta sedang mencari pekerjaan (Basrowi, 2018:107)

2.1.4.3 Faktor Penyebab Pengangguran

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut:

1. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.
2. Struktur lapangan kerja tidak seimbang.

3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang. Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.
4. Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia.
5. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Jumlah angkatan kerja disuatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta (Kadji, 2018:54). Ada beberapa faktor penyebab pengangguran, diantaranya sebagai berikut:

1. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Banyaknya para pencari kerja tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang dimiliki oleh Negara Indonesia.
2. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Banyak jumlah Sumber daya manusia yang tidak memiliki keterampilan menjadi salah satu penyebab makin bertambahnya angka pengangguran di Indonesia.
3. Kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang memilli kekurangan tenaga pekerja.
4. Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, dan sedikitnya pemerataan lapangan pekerjaan.
5. Masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan *soft skill*.
6. Budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pengangguran yaitu:

1. Besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja (Sedikitnya lapangan pekerjaan yang

menampung para pencari kerja). Struktur lapangan kerja yang tidak seimbang (Kurang meratanya lapangan pekerjaan).

2. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja.
3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang.
4. Meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia.
5. Penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang.
6. Ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja.
7. Kegiatan ekonomi yang menurun.
8. Kemajuan teknologi.
9. Kemunduran perkembangan suatu industri.
10. Kekakuan Tingkat Upah (Basrowi, 2018:109).

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti dan mengetahui hasil variabel bebas peneliti terdahulu apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel terikatnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Cita Devi	Tingkat	Jumlah	Tingkat	Jambura

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Ainaya (2025) Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran, dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto	Pengangguran, dan Rata-Rata Lama Sekolah	Penduduk	Pengangguran berpengaruh positif signifikan, dan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto.	<i>Economic Education Journal</i> Volume 7 No 2 April 2025 <i>E-ISSN:</i> 2656-4378 <i>P-ISSN:</i> 2655-5689 <i>Journal Homepage:</i> https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jej/index
2	Puspa Nur Ayda (2025) Analisis Pengaruh Indeks Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Jawa Barat	Tingkat Pengangguran Terbuka	Indeks Pendidikan	Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap IKK Provinsi Jawa Barat.	<i>Creative Research Journal</i> Vol. 11 No. 01 Juni 2025
3	Rahayu Budi Utami (2025) Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah, Tingkat pengangguran terbuka	Angka Harapan Hidup	Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan , rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2017-2023	<i>Jurnal Ekonomi Pembangunan</i> Vol. 7, No. 2, September 2025

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	2017-2023				
4	Intan Zahra Nuraini l (2025) Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Pdrb Sektor Real Estat, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Rata-Rata Lama Sekolah, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka	Pdrb Sektor Real Estat,	Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan, tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Jurnal Media Akademik (JMA) Vol.3, No.12 Desember 2025 e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX
5	Muhamad Arif W (2018) Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Persentase Penduduk Miskin	Rata-Rata Lama Sekolah,	Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja	Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap persentase penduduk miskin.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga Volume 28, No.1, January – May 2018 p-ISSN: 2338-2686 e-ISSN: 2597-4564 Page 22 – 41 Available online at https://e-journal.unair.ac.id/JEBA doi: 10.20473/jeba.V28I12018.5813
6	Surbakti dkk (2023) Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah Dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap	Rata-Rata Lama Sekolah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Kemiskinan	rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Indonesia tahun 2018-2022.	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) Vol. 4, No. 2 September 2023

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	kemiskinan Indonesia Tahun 2018-2022				
7	Sherly Lasmini (2021) Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan Barat	Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengangguran Terbuka	Angka Harapan Hidup	Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh positif dan tidak signifikan dan Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.	Universitas Tanjungpura, Indonesia b1012191016@student.untan.ac.id
8	Abdul Rahim (2024) Analisis Faktor Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengangguran Terbuka Dalam Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa	Rata-Rata Lama Sekolah Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan		Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan Pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumbawa	http://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/jeb
9	Yulia Adella Sari (2021) Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di	Tingkat Pengangguran terbuka	Upah Minimum dan Jumlah Penduduk	tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Vol. 10 No.2 (2021) Hal. 121-130 ISSN: 2088-7485

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Provinsi Jawa Tengah				
10	Siti Hanifah dan Nurul Hanifah (2021) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lamongan	Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum,	pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lamongan	<i>Journal of Economics</i> Vol. 1 No.3 (2021)
11	Faturohim dkk (2023) Pengaruh Kesempatan Kerja dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Jambi	Pengangguran Tingkat Kemiskinan	Kesempatan Kerja	pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jambi	<i>Science of Management and Students Research Journal</i> Vol. 3 No. 4 Desember 2023 Hal. 208-214 ISSN: 2657-1633
12	Bunga dan Wiwin Priana Primandhana (2025) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Pekerja Informal terhadap Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur	Pekerja informal	Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia	Pekerja informal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Nusa Tenggara Timur	Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 10 No.1 Maret 2025 Hal. 79-88 ISSN: 2338-8412
13	Indah Maisyaroh (2022),	Pengangguran dan Tingkat	Pendidikan dan Jumlah Penduduk	pengangguran berpengaruh positif dan signifikan	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
	Pengaruh Pendidikan, Jumlah Penduduk dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Termiskin di Jawa Tengah Tahun 2017-2020	Kemiskinan		terhadap tingkat kemiskinan.	Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Jurusan Ekonomi Islam (EI)

2.2 Kerangka Pemikiran

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang perlu mendapatkan intervensi pada tataran nasional dan juga tataran daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota yang lebih spesifik. Artinya, kebijakan pengentasan kemiskinan yang disusun saat ini tidak lagi bersifat seragam namun perlu memperhatikan kondisi setiap dimensi penyebab kemiskinan suatu wilayah. Dengan sumber daya yang terbatas, penyelesaian dimensi kemiskinan perlu berfokus dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Kemiskinan yang diukur selama ini adalah kemiskinan moneter, dengan melihat ambang batas penentuan miskin atau tidak miskinnya penduduk berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan kebutuhan minimum yang diwakili oleh kemampuan konsumsi penduduk per kapita per bulan, baik konsumsi makanan maupun konsumsi non makanan. Apabila terjadi peningkatan kemiskinan, maka terdapat penambahan penduduk yang tidak bisa memenuhi kebutuhan minimum.

Ada beberapa faktor penyebab tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah, salah satunya penyebabnya adalah jumlah penduduk yang tinggi dan terus meningkat di setiap tahunnya. Jumlah penduduk yang tergolong tinggi dan apabila berkembang lebih lambat dengan hasil-hasil produksi dalam pemenuhan kebutuhan hidup akan dapat meningkatkan kemiskinan. Jumlah penduduk menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan ekonomi, seperti kesejahteraan rakyat dan pengurangan angka kemiskinan. Mengacu pada teori Malthus, sumber daya bumi tidak akan mampu mencukupi kebutuhan populasi yang terus meningkat. Akibatnya, kebutuhan manusia yang tidak terbatas berbandingan terbalik dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhinya, sehingga manusia semakin dekat dengan garis kemiskinan karena tingginya persaingan dalam memenuhi kebutuhan.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat akan memperketat persaingan masyarakat dalam memperoleh lapangan pekerjaan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan peningkatan jumlah kemiskinan. Pengangguran menjadi faktor penting yang berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan. Individu yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran tidak memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga rentan jatuh ke dalam lingkaran kemiskinan. Menurut Sukirno (2006:87), kemiskinan dapat mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kesejahteraan yang telah dicapai. Kemunduran kesejahteraan

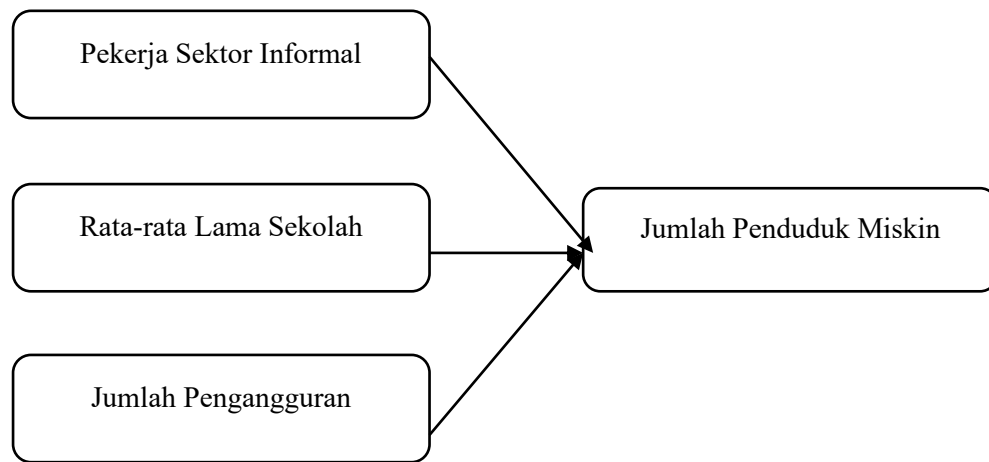
ini dapat memicu masalah lain, yaitu kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran dalam penelitian ini adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Dimana tingkat pengangguran terbuka memberikan indikasi besarnya penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Masalah pengangguran terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan jumlah penduduk usia kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Pengangguran terbuka dihitung sebagai persentase dari total angkatan kerja. Kondisi ini mencerminkan jumlah individu yang benar-benar kehilangan pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan oleh kelebihan pasokan tenaga kerja (*excess liabor*), di mana jumlah pencari kerja melebihi jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga banyak pencari kerja yang akhirnya kehilangan pekerjaan (Pratama, 2019).

Faktor lain yang memengaruhi tingkat kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan pendidikan yang baik, akan lahir generasi yang cerdas, karena pendidikan menjadi landasan utama bagi perkembangan sosial dan ekonomi. Tingkat pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung dalam jangka panjang dengan sistem yang terstruktur dan terorganisir. Keberadaan pendidikan hanya ditemukan dalam kehidupan manusia dan sepenuhnya bergantung pada peran manusia itu sendiri. Tanpa pendidikan, peradaban manusia tidak akan berkembang, karena kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Oleh karena itu, status pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam membentuk

generasi penerus yang berkualitas, yang nantinya berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia suatu negara (Suripto & Subayil, 2020).

Todaro dan Smith (2003:269) menyatakan bahwa teori pertumbuhan modern menekankan pentingnya peran pemerintah dalam membangun modal manusia melalui pendidikan guna mendorong peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas ini menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, modal manusia mencakup pendidikan dan berbagai keterampilan lain yang, bila ditingkatkan, dapat mendorong produktivitas, karena pendidikan memiliki peran signifikan dalam kemajuan ekonomi suatu negara. Salah satu indikator untuk menilai tingkat pendidikan di suatu wilayah atau Negara adalah angka rata-rata lama sekolah, yang menunjukkan tingkat pendidikan rata-rata yang telah dicapai oleh penduduk. Rata-rata lama sekolah mencerminkan jumlah tahun pendidikan yang telah ditempuh seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin banyak pilihan yang tersedia bagi individu untuk mencapai kesejahteraan hidup. Sehingga Pendidikan sangatlah berperan penting dalam mengatasi ketimpangan dan kemiskinan.

Dari kerangka pikir diatas hubungan dari variebel independen, dalam hal ini adalah pekerja sector informal, rata-rata lama sekolah, dan jumlah pengangguran terhadap variabel dependen yaitu jumlah penduduk miskin yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Model Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2019: 96). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga pekerja sektor informal dan jumlah pengangguran berpengaruh positif, sedangkan rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif secara parsial terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat tahun 2006-2025.
2. Diduga pekerja sektor informal, rata-rata lama sekolah dan jumlah pengangguran berpengaruh secara bersama-sama terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Barat tahun 2006-2025.